

## Pragmatisme Kebijakan Luar Negeri Mesir dalam Menyikapi Konflik Rusia-Ukraina

Putri Padmi Nur Wijayati, Yon Machmudi

Politik dan Hubungan Internasional Kajian Timur Tengah dan Islam Sekolah Kajian  
Stratejik Global Universitas Indonesia  
e-mail : Padmijayati@gmail.com

### Abstract

*Russia's invasion of Ukraine resulted in the impact of the global economic crisis in various parts of the world, especially those who depend on imports of natural resources and energy from the two countries in conflict. As a country whose food staple is wheat, Egypt felt the economic impact of this military invasion because most of the country's grain imports came from Russia and Ukraine via the Black Sea trade route. The disrupted supply chain caused the price of bread to rise, a situation that had not occurred since the days of President Anwar Sadat. Egypt must take the right attitude in making foreign policy and choose between the great powers controlled by America and its allies or Russia and its allies. This article aims to analyze the steps taken by Egypt in dealing with this dilemma. Using a qualitative method, the author finds that Egypt's foreign policy is pragmatic, in which El Sisi's government supports countries that help him. The authors also provides several recommendations related to principles and steps that can be taken by Egypt.*

**Keywords:** *Egypt, foreign policy, geopolitics, pragmatism, Russia, Ukraine*

### Abstrak

Invasi Rusia ke Ukraina mengakibatkan dampak krisis ekonomi global di berbagai dunia terutama mereka yang menggantungkan impor sumber daya alam dan energi dari kedua negara yang berkonflik. Sebagai negara yang berbahan pokok pangan gandum, Mesir merasakan dampak ekonomi akibat invasi militer ini sebab sebagian besar impor gandum negara ini berasal dari Rusia dan Ukraina, melalui jalur perdagangan Laut Hitam. Rantai pasokan yang terganggu menyebabkan harga roti naik, sebuah situasi yang tidak pernah terjadi sejak zaman Presiden Anwar Sadat. Mesir harus mengambil sikap yang tepat dalam pengambilan

kebijakan luar negeri dan memilih antara kekuatan besar yang dikendalikan oleh Amerika dengan sekutunya atau Rusia dan sekutunya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis langkah yang dilakukan Mesir dalam menghadapi dilema ini. Dengan menggunakan metode kualitatif, penulis menemukan bahwa kebijakan luar negeri Mesir adalah pragmatis, dimana pemerintahan El Sisi mengambil sikap untuk mendukung negara yang membantunya. Penulis juga memberikan beberapa rekomendasi terkait dengan prinsip dan langkah yang bisa diambil oleh Mesir.

**Kata kunci:** geopolitik, kebijakan luar negeri, Mesir, pragmatisme, Rusia, Ukraina

## Pendahuluan

Invasi Rusia ke Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022 tidak hanya melibatkan Ukraina saja tetapi juga sekutu politik Ukraina terutama Barat melalui NATO. Rusia sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah militer ke Ukraina sejak 2014 dengan menyeret negara-negara di sekitar pecahan Uni Soviet. Tetapi, invasi yang dilakukan Rusia kali ini memicu krisis pengungsian besar-besaran serta krisis kebutuhan energi terutama di Barat yang bersumber dari suplai gas Rusia (Doshi, 2022). Namun, dampak dari invasi berkepanjangan ini ternyata juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi global yang menjadi sebuah krisis politik dan ekonomi.

Sepanjang sejarah, perang selalu memiliki resiko kemanusiaan dan ekonomi bagi negara yang terlibat. Bagi Rusia dan Ukraina, konflik militer ternyata berimbas terhadap kenaikan harga komoditas dunia. Rusia dan Ukraina merupakan pengekspor utama kebutuhan gandum dunia. Rusia juga adalah salah satu produsen gas terbesar untuk kebutuhan Barat. Selain itu, Rusia juga merupakan penghasil minyak bumi, kalium karbonat (potash, bahan baku pupuk), serta berbagai industri pertambangan seperti nikel, palladium, dan aluminium (Tanchum, 2022). Akibatnya, konflik berkepanjangan kedua negara tersebut menjadi sebuah krisis ekonomi global. Asia dan negara-negara Barat telah merasakan dampaknya berupa kenaikan harga minyak dan terbatasnya pasokan gas. Kenaikan harga bahan komoditas sebagai kebutuhan pokok tentu akan melemahkan pertumbuhan ekonomi.

Di saat ekonomi global belum benar-benar pulih akibat Covid-19, ancaman inflasi sudah di depan mata, dan situasi ini dihadapi hampir oleh seluruh negara di dunia. Rantai pasokan global sebelumnya sudah mengalami hambatan dan perlambatan diakibatkan oleh Covid-19. Ketika dunia tengah bersiap untuk kembali menata ekonomi mereka, muncul konflik Rusia-Ukraina yang berkepanjangan. Ini tentu menciptakan tantangan yang luar biasa berat bagi ekonomi dunia.

Mesir termasuk di antara negara yang paling terdampak akibat konflik tersebut. Infrastruktur di Laut Hitam untuk pengiriman logistik terhambat, dan pasokan komoditas alam dari Rusia, terutama gandum, untuk negara tersebut betul-betul mengalami kendala besar. Pasokan pangan dan energi menurun dan gagal memenuhi kebutuhan dalam negeri. Lebih lanjut, terjadi inflasi yang menyebabkan penurunan daya beli masyarakat Mesir (Ghany, 2022).

Ada beberapa negara yang memiliki ketahanan dalam menghadapi krisis ekonomi global akibat konflik Rusia-Ukraina ini, yaitu negara-negara penghasil minyak, gas bumi, perak, emas, nikel dan hasil tambang lainnya. Harga berbagai komoditas tersebut mengalami kenaikan seiring dengan berkepanjangannya konflik Rusia-Ukraina, sehingga, kelebihan pendapatan dari berbagai komoditas tersebut bisa menjadi kompensasi untuk membeli komoditas lain yang diperlukan negara tersebut. Ketahanan juga akan dimiliki oleh negara yang tidak banyak mengimpor hasil bumi dari Rusia dan Ukraina, atau sebagian besar mata rantai pasokannya tidak berasal dari kedua negara yang sedang berkonflik tersebut (Tanchum, 2022).

Tidak terelakan lagi, ketahanan ekonomi suatu negara ataupun perdagangan ekspor sebuah negara ke depannya akan bergantung kepada keberpihakan secara politik serta interdependensi perdagangan yang beraliansi kepada Rusia dan sekutunya, atau beraliansi kepada Ukraina dan sekutunya, yaitu Uni Eropa dan Amerika, sebagai cara untuk menyelamatkan keberlangsungan ekspor dan impor (Ghany, 2022). Dari sisi ini, penting sekali untuk memperhatikan kebijakan atau respon pemimpin negara serta sikap yang ditunjukkan dalam menanggapi konflik Rusia-Ukraina. Mesir menjadi negara yang sangat rentan dari sisi ini, karena kebutuhan gandum mereka dipenuhi oleh impor melalui perdagangan Laut Hitam, yang kini tidak bisa lagi berjalan dengan baik akibat adanya konflik tersebut.

Sektor pertanian Mesir selama ini tidak mampu menghasilkan bahan pangan pokok secara cukup untuk warganya, seperti gandum dan biji-bijian untuk minyak nabati. Akibatnya, kondisi ketahanan pangan Mesir bisa dibilang rapuh dan sangat bergantung pada impor. Agar dapat memenuhi kebutuhan roti dan minyak sayur, makanan pokok warganya yang berjumlah 105 juta orang, pemerintah Mesir mengandalkan volume besar impor bersubsidi besar-besaran. Akibatnya Mesir saat ini adalah importir gandum terbesar di dunia dan satu di antara 10 importir minyak bunga matahari terbesar di dunia. Dampaknya, secara politik pun pemerintahan Presiden Abdel-Fattah el-Sisi kini rentan karena meroketnya harga bahan pangan pokok yang mencapai tingkat yang melampaui anggaran negara (Tanchum, 2022).

Akibat perang Rusia-Ukraina, Mesir harus mencari sumber baru karena konflik ini telah mengganggu pasokan penting dari dua negara pengeksport gandum utama itu. Badan Anggaran Negara Mesir, Otoritas Umum untuk Komoditas Pasokan, telah mengeluarkan tender internasional terkait dengan pembelian 55.000 hingga 60.000 ton gandum. Pasar biji-bijian global menghadapi kekacauan setelah operasi militer Rusia ke Ukraina. Kedua negara yang berkonflik itu adalah penyumbang sekitar 30 persen dari pasokan gandum dunia. Rusia adalah pengeksport gandum terbesar di dunia dan Ukraina termasuk di antara lima besar.

Negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara menjadi salah satu kawasan paling terdampak akibat dari konflik berkepanjangan kedua negara tersebut. Menurut Juru Bicara Regional MENA (Middle East and North Africa) untuk Program Pangan Dunia PBB, konflik sangat berisiko akan membuat pembeli dari Asia ke Afrika dan Timur Tengah rentan terhadap gandum yang lebih mahal jika pasokan terganggu. Itu akan menambah biaya komoditas pangan yang tertinggi dalam satu dekade sebab harga gandum mencapai rekor tertinggi yaitu 387 Dolar AS per ton dalam perdagangan Eropa pada bulan Maret 2022 (Sawy, 2022).

Mesir juga telah membatalkan tender pada kesempatan lalu setelah hanya menerima satu tawaran gandum Prancis, karena setidaknya, dua tawaran diperlukan untuk pembelian yang berkelanjutan. Mesir juga menyiapkan jaringan yang lebih luas dalam tender. Penawaran dari AS, Kanada, Prancis, Bulgaria, Australia, Polandia, Jerman, Inggris, Rumania, Serbia, Hongaria, Paraguay, dan Kazakhstan, adalah pilihan selain Rusia dan Ukraina (Sawy, 2022). Pengiriman akan dijadwalkan pada pertengahan tahun 2022. Tindakan ini harus segera dilakukan sebab gandum sangat penting bagi rakyat Mesir. Sekitar 70 persen rakyat Mesir bergantung kepada roti bersubsidi untuk memberi makan keluarga mereka. Dengan jumlah penduduk lebih dari 105 juta jiwa, Mesir adalah negara Arab berpenduduk paling banyak di dunia. Mesir diperkirakan membutuhkan sekitar 13 juta ton gandum tahun ini, dan negara ini juga harus memiliki cadangan gandum di gudang penyimpanan badan logistik negara tersebut.

Laporan dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) menyebutkan bahwa sekitar 50 persen impor gandum Mesir berasal dari Rusia dan 30 persen dari Ukraina. Ini terjadi karena gandum dari sumber lain harganya jauh lebih mahal. Pada tahun 2021, Mesir mengimpor 11,6 juta ton gandum. Besarnya kapasitas impor gandum ini terjadi untuk menutupi produksi gandum dalam negeri yang hanya mencapai 9,8 juta ton. Meskipun Mesir berstatus sebagai salah satu produsen utama gandum, akan tetapi negara itu tetap saja sangat memerlukan impor gandum untuk menutupi kebutuhan pangan dalam negeri. Perwakilan Mesir untuk FAO menyatakan bahwa Mesir juga harus meningkatkan kapasitas logistik gandumnya, dari 1,4 juta ton satu dekade lalu menjadi

tiga juta ton saat ini (Sawy, 2022). Perlu dicatat, beberapa Arab lainnya seperti Libya dan Lebanon juga mengalami krisis pangan yang sama akibat kebergantungan negara-negara tersebut kepada impor gandum dari Rusia dan Ukraina melalui jalur perdagangan Laut Hitam.

Kenaikan harga pangan di Mesir telah mendorong inflasi pada masyarakat kota, yang meningkat dari 5,9 persen pada Desember 2021 menjadi 7,3 persen pasca konflik. Ini adalah tingkat inflasi tertinggi sejak Agustus 2019. Kenaikan harga pangan dan subsidi dari pemerintah yang menurun telah menjadi masalah yang sensitif secara politik di Mesir. Pemerintah tidak boleh asal-asalan dalam menanggapi hal ini sebab sudah menjadi sejarah bahwa perekonomian rakyat dan politik pemerintah yang tidak tanggap telah memicu beberapa protes selama 50 tahun terakhir. El Sisi tentu harus mengambil kebijakan yang cermat dan melihat pilihan-pilihan sekutu yang ada dalam menanggapi problem ketahanan pangan akibat invasi Rusia dan Ukraina yang tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir.

Pemerintah Mesir telah menetapkan harga roti yang dijual secara komersial sebesar 11,50 pound Mesir per kilogram. Sebenarnya, berbagai laporan menunjukkan bahwa di Mesir, harga pangan, khususnya roti, telah meningkat bahkan sebelum terjadinya konflik Rusia-Ukraina. Akan tetapi, bagi rakyat Mesir, harga yang sekarang telah ditetapkan oleh pemerintahnya itu tetap dianggap sangat berat karena menjadi lebih mahal dibandingkan sebelum konflik. Dilaporkan bahwa harga roti yang tidak disubsidi telah melonjak sebanyak 25 persen, dari 1,00 pound menjadi 1,25 pound Mesir per keping roti (Sawy, 2022).

Mesir selama ini dikenal sebagai negara yang memberikan subsidi kepada rakyatnya dengan memberikan bantuan gandum kepada tiap 30 juta rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan. Untuk keperluan tersebut, Mesir mengimpor total 12 hingga 13 juta ton gandum setiap tahun. Dengan populasi 105 juta, dan pertumbuhan jumlah penduduk sebesar 1,9 persen per tahun, kebutuhan Mesir untuk memberikan subsidi menjadi terus membesar, dan akibatnya, Mesir semakin bergantung kepada impor dari Rusia dan Ukraina untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, dan ini semakin memberatkan keuangan negara. Presiden Mesir Abdel Fattah El Sisi memerintahkan jajaran pemerintahnya untuk memprioritaskan ketersediaan roti non-subsidi, yang dikonsumsi oleh sekitar 40 juta orang Mesir.

Kenaikan harga gandum bagi Mesir menjadi bahan perhatian dan menjadi kebijakan strategis negara khususnya dihubungkan dengan tradisi masyarakat Mesir. Sebagai negara Muslim, tradisi rakyat Mesir sangat diwarnai oleh berbagai peristiwa keagamaan seperti momen bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Kebutuhan Mesir

atas gandum akan meningkat pesat di masa bulan Ramadan. Secara tradisional, kaum Muslimin di Mesir selalu menghidangkan makanan mewah dengan jumlah banyak di bulan Ramadan, di mana sebagian besar makanan tersebut berbahan dasar utama gandum. Pada tahun 2023 yang akan datang, bulan Ramadan jatuh pada kuartal awal tahun yang menjadi tantangan bagi perekonomian Mesir di tengah ancaman krisis global akibat invasi berkepanjangan Rusia dan Ukraina (Cochrane-Dyet, 2022). Yang pasti, saat ini, harga roti terus menaik, sebuah situasi yang tidak pernah terjadi sejak zaman Presiden Morsi menjabat. Situasi ini membuat pemerintah El Sisi mau tidak mau harus mampu mengambil langkah strategis sebagai jalan keluar dari situasi yang buruk ini.

Konflik Rusia-Ukraina yang menjadi penyebab melemahnya ketahanan pangan dan ekonomi Mesir adalah konflik yang terjadi di luar Mesir, bahkan secara geopolitik, kawasan Ukraina-Rusia relatif cukup berjarak dari Mesir. Akan tetapi, faktanya, konflik yang terus berkepanjangan itu telah menimpakan situasi buruk bagi Mesir. Dalam artikel ini, penulis berusaha untuk menganalisis sikap politik dan kebijakan luar negeri yang akan diambil oleh Presiden Mesir El Sisi di tengah konflik Rusia dan Ukraina. Sebagaimana yang diketahui, konflik kedua negara tersebut menimbulkan polarisasi global, karena reaksi masing-masing negara dalam menentukan kebijakan luar negeri umumnya akan menjadi parameter, apakah negara tersebut berada di pihak Amerika – Uni Eropa, atau berada di pihak Rusia-China. Bisa juga negara tersebut malah bersikap netral hingga mendirikan semacam aliansi seperti Gerakan Non Blok di era perang dingin lalu. Dihubungkan dengan Mesir, opsi ketiga ini mungkin saja diambil Mesir mengingat negara itu, bersama Indonesia dan Yugoslavia, pada tahun 1950 pernah menginisiasi berdirinya Gerakan Non Blok (Nosseir, 2020).

Selain menganalisis langkah apa yang kemungkinan diambil Mesir, penulis juga akan merekomendasikan beberapa sikap yang mungkin diambil oleh Mesir sebagai sebuah negara yang sangat bergantung pada impor gandum dari Rusia dan Ukraina, dengan memerhatikan karakter kepemimpinan El Sisi. Presiden El-Sisi selama ini dikenal sebagai pemimpin yang pragmatis dan oportunist menurut beberapa media serta pengamat politik Mesir, sehingga menarik untuk menganalisis kemampuan dan sikap yang akan diambil El Sisi menghadapi situasi seperti ini.

Untuk tujuan penelitian tersebut, penulis melakukan analisis literatur atau pustaka dengan mengambil data-data dari IMF, berita North Africa and Middle East News, Reuters, serta berbagai artikel resmi, baik publikasi media, maupun pres rilis pemerintah Mesir.

### **Pragmatisme dan Geopolitik dalam Sikap Kebijakan Luar Negeri**

Berbagai kebijakan luar negeri diambil berdasarkan kepada premis-premis tertentu, seperti ide, norma, kepercayaan, identitas, dan sejarah yang kesemuanya meliputi sistem domestik negara tersebut. Situasi dalam negeri itulah yang kemudian memengaruhi kebijakan luar negeri (Barnett, 2014). Dalam konteks pendekatan teori konstruktivisme, kebijakan negara memang bisa berubah-ubah, karena prioritasnya ada pada struktur dinamis, bukannya struktur material, sebagai agen perubahan. Kebijakan diambil dengan berfokus kepada ide dan keyakinan sebagai instrumen utama untuk memutuskan jalannya tindakan negara. Ini mensyaratkan bahwa realitas selalu berubah-ubah. Negara dapat memiliki banyak identitas yang dikonstruksi secara sosial melalui interaksi dengan aktor lain. Berdasarkan kepada pendekatan konstruktivisme, interaksi dan hubungan antaraktor internasional merupakan tindakan yang sengaja direayasa. Dengan kata lain, suatu tindakan yang dilakukan oleh aktor tidak serta merta terjadi karena adanya sistem pre given, melainkan merupakan agenda dari aktor itu sendiri (Wicaksana, 2018). Teori ini mempercayai bahwa identitas sebuah negara diciptakan atas kepentingan. Alexander Wendt mengatakan bahwa identitas adalah dasar dari kepentingan (dalam Barnett, 2014).

Sementara itu, geopolitik adalah kejelian dan kecermatan sebuah negara dalam memandang situasi dan kondisi geografisnya, kemudian menganalisis ancaman sekaligus peluang yang ditimbulkan dari lingkungan geografis tersebut. Konsep ketahanan nasional, pembangunan, ketahanan ekonomi dan pertahanan, hingga masalah pengaturan batas-batas negara guna menghindari konflik atau sengketa, merupakan nilai yang tidak dapat ditawar dalam mengambil sebuah keputusan kebijakan luar negeri sebuah negara. Konsep yang demikian tersebut bagi setiap negara berbeda-beda sebab harus diambil dalam pandangan kewilayahan yang di dalamnya juga mengandung unsur strategis yaitu geopolitik. Pentingnya geopolitik bagi sebuah negara juga terkait dengan upaya mempertahankan peran penting kerjasama yang saling menguntungkan dan mencegah konflik antar negara. Dengan begitu, cara pandang geopolitik melihat nilai tawar ke depan yang lebih baik guna merumuskan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utama.

Dalam konteks geopolitik, ada juga istilah yang disebut dengan geoekonomi. Istilah ini merujuk kepada upaya identifikasi suatu situasi internasional kekinian yang berpengaruh kepada kekuatan ekonomi dan militer. Geoekonomi juga terkait dengan geostrategi sehingga kekuatan ekonomi dapat digunakan untuk mencapai tujuan strategis, terutama bagi negara yang memiliki sumber daya alam yang menjadi kebutuhan global.

## Geopolitik Rusia dan Negara-Negara Besar

Dalam konteks geopolitik dan geoekonomi, negara yang memiliki sumber daya alam yang menjadi kebutuhan global seperti Rusia akan memainkan strategi yang digunakan untuk menambah kekuatan ekonomi melalui persekutuan global guna menghadapi Amerika dan Barat yang membantu Ukraina. Kasus operasi militer Rusia di Ukraina saat ini menjadi contoh bagaimana situasi ini membentuk langkah geopolitik yang diambil dunia dan negara-negara Barat terkait dengan faktor sumber energi kebutuhan mereka, yaitu gas alam dan sumber daya alam lainnya dari Rusia, berikut berbagai pengaruhnya yang sangat luar biasa di Barat. Intinya, geoekonomi adalah instrumen ekonomi untuk menghasilkan keuntungan geopolitik (Harris dan Jennifer, 2016).

Pendekatan pada ketiga hal di bawah ini biasa digunakan oleh Amerika Serikat untuk menguasai Timur Tengah. Maka, pendekatan yang sama mungkin saja dilakukan oleh Rusia terhadap Barat dan negara-negara yang memihak Ukraina.

1. Negara lebih memprioritaskan pendekatan ekonomi daripada geopolitik, namun negara menggunakan fokus geopolitik untuk tujuan akhir ekonomi.
2. Kebijakan luar negeri diambil dalam ranah geopolitik dengan alasan ekonomi, sehingga ekonomi bukan alasan utama arah kebijakan luar negeri.
3. Ekonomi bertujuan untuk mengisi militer, dan pada saat yang sama, militer digunakan sebagai sumber kekuatan ekonomi.

Geopolitik yang menggunakan kekuatan hukum, militer, dan politik biasanya akan berakhir dengan benturan fisik keras (perang atau konflik). Dalam kasus konfliknya dengan Ukraina, Rusia mengetahui bahwa Barat menerapkan strategi mencari simpati dan dukungan Dunia. Karena itu, Rusia tidak mungkin hanya menggunakan pendekatan militer dalam konfliknya dengan Ukraina ini. Rusia memahami dengan baik kendali kekuatan strategisnya atas Barat dan negara yang bertukar kebutuhan sumber daya alam. Karenanya, Rusia juga berfokus pada kebijakan perdagangan dan harga jual energi.

Rusia memahami bahwa benturan kekuatan politik bisa dihindari ketika ada ketergantungan ekonomi yang kuat dari sejumlah negara, dan masing-masing negara, dengan melihat pendekatan ketergantungan sumber daya energi saat ini (seperti yang terjadi pada negara-negara Barat dan berbagai negara lainnya), tidak akan fanatik

bersekutu secara politik, apalagi jika ekonomi menjadi alasan kebutuhan mereka dalam menkalin persekutuan. Pada akhirnya, pemegang kendali tetap berada pada pemasok dan pihak-pihak yang mampu mengontrol kebutuhan energi global. Pihak-pihak inilah yang akan memiliki daya tawar kuat dalam polarisasi politik.

Kajian geopolitik mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang dapat mengatur mobilitas dalam mengarahkan kepentingan negara. Kajian geopolitik akan mempunyai nilai yang lebih penting apabila disandingkan dengan geostrategi yang memuat beragam cara untuk mengelola unsur-unsur penting geopolitik suatu negara dalam menghadapi isu tertentu. Hubungan antara geopolitik dan geostrategi bermakna menjadikan geopolitik sebagai landasan awal saat akan melakukan perluasan politik dengan mempertimbangkan faktor geografisnya. Melalui geostrategi, dapat dilihat bermacam potensi yang dimiliki suatu negara. Upaya yang dilakukan untuk memperluas kekuasaan melahirkan empat konsep dasar geopolitik, yaitu *time*, *people*, *space*, dan *struggle* (O'Tuathail, 1996). *Time* merupakan unsur yang menjelaskan waktu dari suatu fenomena; *people* merupakan aktor-aktor yang terlibat; *space* menunjukkan cakupan ruang, teritorial, atau objektif statis dari suatu fenomena; sedangkan *struggle* merujuk kepada usaha dan interaksi dari para aktor untuk mencapai tujuannya. Keempat konsep ini terpenuhi pada situasi Mesir saat ini, sehingga menjadi hal yang mendesak bagi negara ini untuk segera memutuskan sikap. Dihubungkan dengan keempat konsep geostrategis ini, penulis memiliki pendapat sebagai berikut.

1. *Time*: situasi konflik Rusia dan Ukraina yang masih belum diketahui akhir selesainya.
2. *People*: sudah banyak pemimpin dunia yang mengambil sikap tegas untuk menunjukkan keberpihakan di antara dua kubu yang berseteru (antara Barat dan Rusia).
3. *Space*: konflik Rusia-Ukraina tidak hanya melibatkan Rusia dan Ukraina, melainkan juga sudah melibatkan Amerika dan Negara di Eropa sebagai cakupan efek dari konflik tersebut.
4. *Struggle*: banyak negara yang sudah mendapatkan imbas dari konflik ini, terutama imbas ekonomi berupa inflasi dan kenaikan komoditas utama, dan situasi ini mau tidak mau membuat berbagai negara itu mengambil tindakan dan respons

## Kebijakan Luar Negeri Pragmatis Mesir

Konflik Rusia melawan Ukraina (yang didukung oleh Barat) menjadi krisis yang rumit tapi mendesak untuk segera ditangani. Liga Arab sendiri telah merilis resolusi yang menyerukan "diplomasi dan penghindaran eskalasi" yang secara umum menekankan pada aspek kemanusiaan. Resolusi itu juga menekankan "hubungan dekat" negara-negara Arab dengan kedua belah pihak, sehingga tidak menunjukkan kepastian, apakah mereka berada di pihak Rusia atau Barat. Mesir yang memiliki hubungan yang luas dan rumit dengan Rusia dan Barat, akan dinilai kontraproduktif jika melangkah ke satu sisi atau yang lain. Untuk negara yang secara konsisten mempertahankan posisi kebijakan luar negeri yang independen dan konservatif, situasi saat ini sangatlah rumit.

Sampai saat ini, upaya untuk mendorong Mesir dalam desakan diplomatik yang intens yang dilakukan baik Kedutaan Rusia ataupun Ukraina di Kairo telah sampai kepada tuntutan agar Mesir berani memberikan sikap dukungannya (Mabrouk, 2022). Bahkan, muncul desas-desus bahwa Amerika meminta Mesir untuk menutup Terusan Suez dari kapal-kapal Rusia, di mana hal ini dibantah kepala Otoritas Terusan Suez, Osama Rabie. Perkembangan ekonomi Mesir tetap menjadi perhatian utama. Sumber ekonomi bisnis mengkonfirmasi bahwa jauh sebelum invasi, ada diskusi dengan berbagai negara Barat, termasuk Amerika, mengenai investasi dan pinjaman baru yang sangat dibutuhkan oleh Mesir, sehingga, Mesir perlu bekerja keras untuk membayar utang-utangnya. Namun, Mesir juga memiliki kerja sama yang signifikan dengan Rusia dalam masalah energi dan militer, dan, yang lebih penting, dalam hal impor dan ekspor makanan (Mabrouk, 2022).

Dengan demikian, tampak bahwa Mesir belum memiliki sikap yang jelas. Mesir masih berusaha terbuka dan mencari peluang dengan tidak memihak. Berbagai kebijakannya sangat mungkin berubah secara dinamis. Konsep geostrategis menjadi dasar bagi kebijakan luar negeri dan nasional, dalam hal ini Mesir, untuk menerapkan sebuah kebijakan yang menguntungkan bagi negaranya. Meskipun tetap menjadi catatan bahwa dalam pengambilan keputusannya, konsep geostrategis juga bisa dilihat dan diperoleh secara historis karena kesamaan sejarah, hubungan antar negara, budaya dan bahkan propaganda (Amirkhanov, 2022). Catatan terakhir ini bisa dijadikan sebagai pendekatan untuk menganalisis banyaknya kebijakan negara-negara Arab yang berubah, serta beberapa beberapa negara di Eropa yang mulai memikirkan pragmatisme daripada mempertahankan sebuah hubungan akrab atas dasar budaya yang sama dalam menyikapi permintaan minyak dan naiknya komoditas akibat konflik Rusia dan Eropa.

Presiden Mesir El Sisi selama ini dikenal sebagai pemimpin yang selalu berusaha mencari jalan tengah, mementingkan kekuatan militer, serta menjalankan kebijakan politik yang pragmatis. Sejumlah media, baik di dalam negeri Mesir maupun media internasional, menilai kebijakan luar negeri Mesir sebagai kebijakan yang tidak memiliki sikap dan cenderung memihak siapapun yang menguntungkan. Secara tersirat, hal ini telah disampaikan oleh El Sisi pada pidato yang disampaikan tahun 2014 saat menjadi Presiden Mesir menggantikan Muhammad Morsi yang diturunkan dari jabatannya.

Berikut beberapa bentuk sikap El Sisi yang mencerminkan pragmatisme pemimpin. Pada saat pidato resmi di tahun 2014, El Sisi menyampaikan bahwa pemerintahannya akan membangun hubungan baik dengan seluruh negara. Mesir bersikap terbuka bagi siapapun yang ingin menjadi sekutu. Menurut peneliti politik lokal, El Sisi memang ingin keluar jalur, enggan mengikuti pendahulunya Anwar Sadat dan Hosni Mubarak yang cenderung bersekutu dengan Amerika Serikat. Bahkan, El Sisi terkadang bersikap seakan-akan mengabaikan aliansi politik yang pernah ada. Pada saat diundang oleh Amerika untuk membahas bantuan militer, El Sisi memilih untuk menemui Rusia dan bekerja sama dalam membangun reaktor nuklir di Mesir. Ditambah lagi, El Sisi kemudian menandatangani proyek jangka panjang kerjasama ekonomi dengan China dalam proyek pembangunan besar-besaran jalur sutra Belt Road Initiative (BRI) China di Mesir dan hal ini jelas membuat Amerika tidak senang (CGTN AFRICA, 2014). Namun, di sisi lain, pada saat terjadi masalah ekonomi, Mesir di masa El Sisi tetap menerima bantuan pinjaman dari IMF.

Langkah-langkah pragmatis dilakukan oleh El Sisi sebagai cara dalam memperkuat posisi dan memperkuat sekutu Mesir. Sebagai pemimpin yang menghabiskan puluhan tahun di militer, mau tidak mau, citra kemiliteran selalu lekat dengan El Sisi, padahal rakyat Mesir cenderung tidak menyukai pemimpin yang bertangan besi dan terlalu militeristik. Atas dasar itulah, El Sisi harus selalu menekankan pendekatan ekonomi dalam pemerintahannya, dan ini yang memberi kesan kuat pragmatisme sebagai watak dari El Sisi. Secara teori, pemimpin yang pragmatis adalah seorang yang dengan lihai dan tegas menawarkan reaksi cepat untuk perubahan kebijakan internasional, dengan secara terus-menerus menyesuaikan posisi, dan dapat mengambil keputusan yang tidak ortodoks yang berpotensi menimpakan kerugian (Amirkhanov, 2022).

Upaya Mesir untuk tetap mendekati Barat dan juga mendekati Rusia membawa perubahan dalam persepsi kekuatan luar negeri. Pragmatisme kepemimpinan El Sisi dalam beberapa tahun terakhir terlihat jelas ketika kebijakan luar negeri Mesir berubah-ubah terutama terkait kepentingan Barat, Rusia, dan China. Pendekatan pragmatis berarti bahwa suatu negara telah secara transparan merumuskan tujuan strategisnya

menggunakan metode fleksibel untuk mencapainya. Pragmatisme menyiratkan kepentingan yang sungguh-sungguh, memutuskan yang paling menguntungkan, serta menggunakan prinsip yang tidak tunduk kepada tawar-menawar, jika perlu melawan jalur umum, sebab kebijakan pragmatis membela prinsip-prinsip vital, bukan dogma (Maher, 2022).

Dinamika politik global sejak konflik Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan ini menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan secara serius oleh pemerintah di seluruh dunia, terutama negara yang terdampak secara ekonomi akibat terganggunya ekspor impor utama mereka dari kedua negara yang berkonflik tersebut. Salah satu negara yang terkena dampak tersebut adalah Mesir. Negara ini sudah seharusnya dapat mengambil sikap yang tepat, rasional, dan berpandangan jauh ke depan dalam mengambil kebijakan luar negerinya secara hati-hati. Kebijakan tersebut tetap harus berlandaskan kepada pencapaian tujuan dalam negeri di berbagai bidang dengan tetap mengawasi perubahan arus politik luar negeri yang tidak terlepas dari lingkungan strategis regional dan global yang saat ini dipengaruhi oleh konflik Rusia-Ukraina (Nosseir, 2020). Pada konflik Rusia-Ukraina, negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa cenderung menunjukkan dukungan mereka kepada Ukraina, baik melalui kebijakan mereka dalam memboikot produk-produk Rusia dan mempertahankan sanksi perdagangan kepada Rusia, maupun dengan memberikan bantuan secara militer kepada Ukraina. Sanksi-sanksi yang telah diberlakukan sejak Februari 2022 oleh Amerika dan Sekutu Uni Eropa adalah pembatasan terhadap transaksi keuangan luar negeri yang mencakup pelarangan melakukan transaksi dalam sistem perbankan Amerika dan Eropa. Menariknya, Uni Eropa hanya berani melakukan larangan pada pembelian refined oil products, tetapi belum berani melakukan penghentian jalur gas Nordstream ke Eropa (Doshi, 2022).

Dalam kasus sanksi perdagangan ini, China, sebagai sekutu Rusia, mendapatkan harga bersahabat pada transaksi gas dan minyak dari Rusia. Harga murah minyak dan gas ini juga ditawarkan oleh Rusia kepada negara-negara yang dianggap sebagai sahabat (Hendawi, 2022). Hal ini merupakan penawaran yang sangat baik dikarenakan sejak konflik berlangsung, harga minyak dunia naik tajam disebabkan sanksi yang dijatuhkan Amerika dan Uni Eropa tersebut. Belakangan, sejumlah negara Eropa mulai menunjukkan gelagat ketidaksetujuannya atas sanksi yang diberlakukan atas Rusia tersebut, dengan alasan bahwa dampak yang dirasakan oleh berbagai negara di Uni Eropa berbeda-beda dan ketahanan mereka juga berbeda-beda. Bagi sebagian negara Eropa, keberlangsungan transaksi dagang dengan Rusia adalah opsi terbaik di saat mereka sedang melakukan perbaikan ekonomi akibat pandemi.

Bagi negara berkembang, melakukan aliansi strategis dengan negara besar yang tepat akan membawa negara tersebut kepada sebuah hubungan yang saling menguatkan dan menguntungkan di tengah situasi politik dunia di mana negara-negara besar mulai mencoba mengontrol pemetaan dunia dengan berbagai macam bentuk kebijakan yang mereka tawarkan pada dunia (Hendawi, 2022). Kebijakan yang ditawarkan oleh negara-negara besar tersebut bisa menjadi sebuah strategi geopolitik untuk mengatur dan mendapatkan keuntungan dari negara berkembang melalui tawaran yang menjebak berupa win-win solution.

Faktanya, langkah-langkah yang diambil sejumlah negara yang merespon dengan cepat isu Rusia-Ukraina dan ikut-ikutan dalam memberikan sanksi tanpa melakukan pengamatan terlebih dahulu telah menyebabkan inkonsistensi kebijakan yang berakibat fatal baik dari posisi politik kepada sekutu ataupun posisi tawarnya kepada Rusia (Maher, 2022). Pengambilan kebijakan luar negeri memang harus diambil cepat terutama bagi negara yang berada dalam ancaman teritori. Namun, perubahan sikap beberapa negara Eropa dan Arab menunjukkan bahwa negara-negara tersebut seharusnya bersikap cermat dalam menentukan sikap dengan menimbang dampak ekonomi, hubungan kerjasama, serta fakta adanya ketergantungan komoditas ekonomi strategis kepada Rusia.

Mesir di bawah kepemimpinan Presiden Fattah El Sisi yang menjabat sejak 2014 telah mempertahankan hubungan dekatnya dengan Amerika Serikat sambil tetap menjalin hubungan persahabatan dengan saingan Amerika, yaitu Rusia dan China. El Sisi juga menjalin hubungan yang beragam dengan negara Uni Eropa, dan hubungan yang mendalam dengan anggota-anggotanya, yaitu Yunani, Siprus, Italia, Prancis, dan Jerman (Hendawi, 2022). Terbaru, Mesir menandatangani kontrak kerjasama proyek besar-besaran dengan China yaitu pembangunan proyek Belt and Road Initiative yang masih berjalan hingga saat ini. Pemerintahan Mesir memang terkenal dengan pendekatan pragmatis sejak negara itu dipimpin oleh El Sisi. Berbagai kebijakan luar negeri dirancang untuk mendorong kerja sama ke seluruh negara kekuatan besar dunia, yaitu Amerika, China, dan Rusia (Maher, 2022). Tetapi mempertahankan jalan tengah ini mungkin lebih sulit ke depan mengingat polarisasi global yang diciptakan oleh perang di Ukraina dan reaksi Amerika dan sekutu Baratnya.

Secara teknis, jika Mesir tidak bisa mendapatkan gandum (atau senjata) dari satu sumber, anggaran keuangan yang dimiliki Mesir dapat digunakan untuk membeli kebutuhan ekonomi tersebut di tempat lain. Tapi masalahnya, jika aliansi berubah di kemudian hari, kebijakan tersebut juga harus segera diubah. Mesir saat itu perlu beralih dari 'masuk di antara' ke 'tindakan penyeimbangan'. Mesir harus memiliki kemampuan

untuk memilih kebijakan yang tepat sehingga kepentingan nasional bisa tercapai secara maksimal (Barnett, 2014).

### **Antara Kekuatan Militer dan Stabilitas Ekonomi Mesir**

Sebagai seorang mantan perwira militer, El Sisi tetap menjadikan militer sebagai salah satu pendekatan saat mengelola negara. Hal ini terbukti dari sangat besarnya anggaran persenjataan dan kekuatan militer. Transaksi perdagangan senjata Mesir dengan Rusia juga sangat besar, bahkan yang paling besar dibandingkan dengan transaksi senjata Mesir dengan negara-negara lainnya, termasuk Amerika Serikat. Data yang ditulis Middle East Eye menunjukkan bahwa dalam kurun waktu dari tahun 2013 hingga 2020, mitra transaksi senjata terbesar bagi Mesir adalah Rusia. Mesir mengimpor senjata dari Rusia dengan nilai transaksi di angka 3,46 Milyar Dolar AS. Setelah Rusia, ada Perancis dengan nilai transaksi sebesar 3,01 Milyar Dolar AS, diikuti Amerika dengan nilai 1,97 Milyar Dolar AS, dan Kanada sebesar 42 Juta Dollar AS. Pemimpin yang berasal dari militer memang cenderung untuk tetap menggunakan pendekatan militer dalam mengatur pola hubungan dengan negara lain. Akan tetapi, situasi di dunia saat ini bukanlah situasi yang dapat diselesaikan dengan militer. Dengan terganggunya pasokan impor melalui Laut Hitam yang akhirnya berdampak pada masalah ekonomi Mesir, El Sisi mestinya harus mengelola hubungan strategis dengan Rusia dan China di Laut Hitam, demi mengamankan sektor ekonomi dalam negeri.

Mesir juga bisa menjadikan langkah Arab Saudi sebagai sebuah preseden. Arab Saudi adalah sekutu Mesir yang kerap sejalan dengan Amerika Serikat dalam berbagai kebijakan luar negerinya. Akan tetapi, dalam kebijakan ekspor minyaknya, Arab Saudi membuat keputusan yang mengejutkan. Melalui Putra Mahkota, Pangeran Mohammed bin Salman, Arab Saudi berencana memberikan harga penjualan minyak dalam mata uang Yuan (RMB China), di saat China telah bekerjasama dengan Rusia dalam bilateral transaksi perdagangan bilateralnya menggunakan mata uang negara masing-masing (BBC, 2022). Mesir dapat melihat tindakan berani Arab Saudi ini sebagai contoh sikap. Dengan mencontoh Arab Saudi, Mesir sangat mungkin akan menemukan jalan keluar atas masalah ekonomi negaranya. Bahkan, Mesir mungkin malah bisa mendapatkan peluang investasi alternatif baru di bidang militer dan keamanan.

Tantangan keamanan dan militer bagi Mesir juga ada pada kemungkinan perluasan NATO. Sebagaimana yang diketahui, salah satu pemicu utama konflik Rusia-Ukraina adalah klaim Rusia bahwa Ukraina, sebagai negara Eropa yang berbatasan dengan Rusia, akan menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), dan ini dianggap sebagai ancaman keamanan sangat serius bagi Rusia. Upaya AS dan negara-

negara Eropa untuk memperluas keanggotaan NATO sangat mungkin akan menyasar negara-negara Arab dan Afrika utara, terutama negara-negara yang selama ini menjadi mitra militer strategis AS seperti Mesir. Perluasan keanggotaan NATO ini dipastikan akan berdampak negatif serta meningkatkan ketidakamanan bagi kepentingan nasional Mesir jika memang akan berpihak pada NATO.

Tantangan militer berikutnya adalah terkait dengan peluang untuk untuk meningkatkan hubungan militer dengan Rusia dan China. Konflik Rusia-Ukraina telah membuka peluang adanya tawaran pengembangan kerjasama dengan Rusia dan China yang sedang memainkan kartu geopolitik melalui mekanisme resolusi konflik, investasi pembangunan jalur perdagangan, dan pembangunan basis militer. Hanya saja, peningkatan kerjasama di bidang militer dengan Rusia dan China ini patut diperhitungkan kemungkinan konfrontasi militer dari AS dan Barat, jika kemudian Amerika Serikat yang memimpin NATO secara serius membantu Ukraina melalui partisipasi perang secara langsung (Cochrane-Dyett, 2022).

Mengingat kondisi dunia saat ini, dan juga watak pemimpin Mesir El Sisi yang telah memiliki sikap di awal pelantikannya bahwa dia ingin menjalin hubungan baik dengan siapapun, maka, pragmatisme aktor negara diperlukan terutama dalam menghadapi ketidakpastian iklim politik dunia yang diakibatkan adanya konflik Rusia-Ukraina ini. Dalam konflik ini, Rusia dan China menjalankan perang proksi serta perebutan pengaruh di berbagai kawasan dunia, dengan alasan keamanan wilayah dan dominasi ekonomi, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Situasi ini tentu akan memengaruhi kebijakan politik luar negeri Mesir yang ekonominya terdampak oleh konflik. Kecermatan harus diperhatikan dalam mengambil kebijakan karena pilihan bersekutu dengan pihak manapun memiliki sensitivitas yang sangat tinggi. (Maher, 2022).

Sayangnya, Mesir tidak memiliki posisi tawar menawar yang cukup kuat dalam krisis internasional saat ini dari sisi kekuatan militernya. Saat ini, posisi Mesir cukup rentan karena negara itu sedang berhadapan dengan lemahnya ketahanan pangan. Dengan demikian, bagi Mesir, memainkan kartu militer bukanlah pilihan yang tepat. Apalagi saat ini, Mesir setiap tahun menerima bantuan militer dari AS sebesar 1,3 Milyar Dolar AS. Kedua negara juga mempertahankan tingkat kerja sama keamanan yang tinggi dan berbagi data intelijen. Sementara itu, kerja sama militer dengan Rusia sebagian besar terbatas pada pengadaan peralatan militer serta adanya rencana bagi Rusia untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di Mesir.

Selain dampak perang Rusia di Ukraina yang berimbas kepada ekonomi dan harga pangan, polarisasi global yang terbentuk sebagai akibat dari konflik kemungkinan

akan memperparah tantangan yang akan dihadapi Mesir saat mencoba memetakan jalan tengah. Situasinya menjadi semakin sulit dengan kemungkinan keterlibatan langsung Amerika Serikat pada konflik bersama dengan negara-negara anggota NATO. Dalam sejarahnya, Mesir sebenarnya pernah dihadapkan kepada situasi polarisasi global di masa Perang Dingin tahun 1950-an. Saat itu, Mesir menjadi salah satu negara inisiator berdirinya Gerakan Non Blok. Preseden sejarah seperti ini bisa saja dijadikan oleh Mesir sebagai landasan untuk mengambil kebijakan luar negeri di masa sekarang ini. Artinya, Mesir mungkin saja akan kembali menggalang dukungan dari negara-negara Dunia untuk menghidupkan kembali Gerakan Non Blok.

Gerakan Non Blok adalah sebuah koalisi global negara-negara berkembang yang berusaha untuk meredakan persaingan kekuatan besar yang berdampak buruk kepada situasi internal negara-negara lain di berbagai bagian dunia. Mesir, bekas Yugoslavia dan Indonesia mendirikan gerakan ini pada 1950-an. Gerakan ini tidak seperti duduk di antara kedua belah pihak yang membangun aliansi, atau mencoba menjadi pahlawan dalam menengahi negara yang terlibat perang dingin, melainkan lebih kepada pencarian posisi alternatif di luar opsi permusuhan dan benturan. GNB juga menjadi wadah yang memberikan peran lebih besar untuk negara-negara berkembang. Kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, GNB menunjukkan bahwa koalisi ini adalah jalan tengah dan menjadi solusi bagi negara berkembang yang tidak bisa terlibat ke dalam polarisasi global. Dengan demikian, apabila konflik Rusia-Ukraina memunculkan situasi yang mirip dengan era perang dingin lalu maka Mesir, sebagaimana yang dilakukannya di masa lalu, bisa saja tampil kembali untuk mengembangkan Gerakan Non Blok yang baru.

## Simpulan

Ekonomi menjadi salah satu instrumen penting kekuatan posisi tawar menawar sebuah negara dalam konteks perpolitikan global. Dampak ekonomi akibat ketergantungan sumber daya alam dan kebutuhan rakyat terkadang tidak sejalan dengan ambisi pemimpin negara, sehingga memperburuk ketahanan ekonomi dalam negeri. Sebagai negara berkembang, Mesir pada dasarnya harus bisa melihat kepentingan nasional mereka dalam menyikapi situasi ini, baik yang terkait dengan kepentingan nasional jangka pendek maupun jangka panjang.

Pragmatisme boleh saja dijadikan pegangan dalam membentuk kekuatan baru terutama pemetaan terhadap lawan-kawan politik dunia. Tetapi, kebijakan ini harus diambil dengan cermat didasarkan kepada situasi dan kondisi yang memungkinkan negara untuk mengambil sikap tersebut. Kerjasama yang telah ada tentu harus dipertahankan. Akan tetapi, Mesir juga harus menghitung dampak buruk yang akan

terjadi jika salah dalam memihak atau, sebaliknya, malah terlambat dalam mengambil sikap. Membuat gerakan baru seperti Non Blok mungkin akan menjadi jalan tengah apabila Mesir mampu menggalang dukungan dari sejumlah negara lain yang memiliki daya tawar yang kuat di bidang sumber daya alam dan energi, serta tidak bergantung kepada pasokan komoditas dari Rusia maupun Barat.

Strategi memacu pertumbuhan ekonomi tentu sangat bergantung kepada besaran investasi asing yang masuk untuk menggerakkan perekonomian, pembangunan, dan mendukung kebijakan rezim. Karena situasi politik global yang tidak stabil, maka, apabila salah dalam mengambil keputusan, probabilitas masuknya investasi asing justru akan mengecil. Kedekatan Mesir dengan Amerika sekaligus China melalui pinjaman pembangunan, sangat memengaruhi kebijakan yang diambil Mesir dalam konflik Rusia-Ukraina ini. Hal ini tentunya akan menguji pemerintahan rezim El Sisi untuk menjalankan prinsip politik luar negeri yang tepat dalam merespons dinamika politik global yang tidak ramah ini.

Berikut ini adalah beberapa rekomendasi terkait dengan prinsip dan langkah yang bisa diambil oleh Mesir. Pertama, kepentingan nasional harus selalu menjadi acuan dalam praktik diplomasi di forum global. Namun demikian, kepentingan nasional diupayakan dapat tercapai melalui mekanisme yang kolaboratif dengan negara yang menguntungkan dan kepentingan yang tidak didorong atau disetir oleh konflik yang ada. Kedua, Mesir tetap harus mempertahankan kondusivitas relasi dengan negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA, Middle East dan North Africa). Dalam situasi seperti ini, Mesir sangat memerlukan dukungan secara geopolitik dari negara-negara tersebut, yaitu Liga Arab dan aliansi MENA lainnya. Prinsipnya, kawasan MENA yang stabil akan berdampak positif bagi lingkungan dalam negeri Mesir itu sendiri.

Dengan demikian, dalam menentukan kebijakan politik Mesir di bawah kepemimpinan militeristiknya, El Sisi harus mengingat sebuah nasihat lama: *strength of a nation's currency is based on the strength of that nation economy*. Prinsip kebijakan seperti ini makin mendesak untuk diambil mengingat fakta bahwa seluruh dunia saat ini merasakan dampak buruk ekonomi akibat konflik Rusia-Ukraina. Pilihan seperti inilah yang akan membantu Mesir keluar dari situasi sulit ekonominya.

## Daftar Pustaka

- Amirkhanov, E. (2022). Analysis of Russia-Ukraine War from the Perspectives of Three Theories of International Relations. ResearchGate, Issue ResearchGate Publication, hal. 2-5.
- Barnett, M. (2014). *Social Constructivism. In: The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. New York: Oxford University Press.
- CGTN AFRICA. (2014). Egypt to Embrace an Independent Foreign Policy.
- Cochrane-Dyett, W. (2022). AlBawaba. [Online] Dalam: <https://www.albawaba.com/insights/ukraine-geopolitics-and-propaganda-russia-middle-east-1494143> [Diakses 24 Oktober 2022].
- Doshi, T. (2022). Forbes. [Online] Dalam: <https://www.forbes.com/> [Diakses 26 Oktober 2022].
- Ghany, M. A. E. (2022). Reuters. [Online] Dalam: <https://www.reuters.com/world/middle-east/egypt-increases-social-support-economic-crisis-hurts-2022-07-26/> [Diakses 22 Oktober 2022].
- Harris, R.D. B. dan Jennifer M. (2016). *War by other means : Geoeconomics and statecraft*. Harvard: Bleknap Press.
- Hendawi, H. (2022). The National News MENA. [Online] Dalam: <https://www.thenationalnews.com/mena/egypt/2022/03/01/egypt-treads-careful-middle-ground-on-russia-ukraine-conflict/> [Diakses 23 Oktober 2022].
- Mabrouk, M. F. (2022). MEI. [Online] Dalam: <https://www.mei.edu/publications/getting-complicated-hurry-implications-egypt-russias-invasion-ukraine> [Diakses 8 Desember 2022].
- Maher, A. (2022). The National News MENA. [Online] Dalam: [www.thenationalnews.com/mena/](http://www.thenationalnews.com/mena/) [Diakses 27 Oktober 2022].
- Nosseir, M. (2020). Moderndiplomacy. [Online] Dalam: <https://moderndiplomacy.eu/2020/05/14/egypt-needs-to-better-leverage-its-foreign-policy/> [Diakses 24 Oktober 2022].
- O'Tuathail, G. (1996). *Critical Geopolitics*. London: Routledge.
- Sawy, N. E. (2022). The national news MENA. [Online] Dalam: <https://www.thenationalnews.com/mena/2022/02/27/top-wheat-importer-egypt-looks-for-sources-outside-russia-and-ukraine/> [Diakses 23 Oktober 2022].

Tanchum, M. (2022). MEI. [Online] Dalam: <https://www.mei.edu/publications/russia-ukraine-war-has-turned-egypts-food-crisis-existential-threat-economy> [Dalam 24 Oktober 2022].

Wicaksana, I. G. (2018). Konstruktivisme. Dalam “Teori Hubungan Internasional: Perspektif-perspektif klasik”. Surabaya: Airlangga University Press.